



# 12.72%

SIMILARITY OVERALL

SCANNED ON: 22 JAN 2025, 12:26 PM

## Similarity report

Your text is highlighted according to the matched content in the results above.

**IDENTICAL** 0.41%    **CHANGED TEXT** 12.31%    **QUOTES** 0.59%

## Report #24496459

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memperkenalkan slogan "ASN PILIH NETRAL" sebagai langkah pencegahan pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu 2024. Slogan ini disajikan dalam bentuk logo, poster, dan twibbon yang dapat diunduh oleh seluruh masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia dapat secara bersama-sama menggunakan dan membagikan slogan ini melalui akun media sosial mereka. Hal ini diharapkan menjadi inisiatif kolektif serta bagian dari komitmen ASN terhadap netralitas dan integritas, yang perlu terus diingatkan dan dijaga bersama (Kasn.go.id, 2023) KASN, sebagai lembaga pengawas independen, berharap bahwa insiden- insiden pelanggaran di dalam birokrasi dan di kalangan ASN di kementerian/lembaga/daerah dapat mengalami penurunan dari jumlah 1.678 tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN tercatat pada periode 2020-2022. Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas ini melibatkan motif pemanfaatan sumber daya birokrasi, termasuk dukungan program, fasilitas, dan kecenderungan untuk mendukung calon tertentu (Kasn.go.id, 2023). **1 Masalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kerap menjadi perhatian media, dapat dilihat dari beragam kendala yang terjadi yaitu keterlibatan pada aktivitas pasangan pemilihan umum, membuat keputusan ataupun tindakan yang memihak pasangan calon, menggunakan fasilitas negara dengan alasan tugas negara, dan**

membuat kegiatan yang mengarah netralitas kepada calon peserta pemilu. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk menjamin netralitas ASN khususnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak pada tahun 2024. Menurut data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dalam Pemilihan Kepada Daerah tahun 2020, tercatat sebanyak 917 pelanggaran netralitas yang dikejakan oleh ASN, sebanyak 484 kasus dengan mengerahkan dukungan untuk salah satu paslon di media sosial, 150 kasus datang ke acara sosialisasi partai politik, 103 kasus melangsungkan pendekatan terhadap partai politik, 110 kasus mendukung salah satu pasangan calon, serta 70 kepala desa mendukung salah satu pasangan calon (Bawaslu.go.id, 2022).

1 Tentu saja, hal ini memerlukan perhatian serius, terutama dari kepala daerah yang memiliki peran sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah. Di saat menjelang pemilu 2024, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima 201 pengaduan yang diantaranya, 88 (43,8%) terbukti melanggar dan 59 (67,1%) sudah diberikan hukuman oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) (Nurlan HK, 2023). Isu tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup penting bagi media online karena akan memiliki dampak yang signifikan terhadap tata kelola pemerintah, kepercayaan publik, dan demokrasi. Netralitas ASN merupakan salah satu sikap yang penting dalam proses demokrasi agar berjalan dengan jujur dan adil. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral dapat mendukung pemilihan umum yang transparan dan bebas dari konflik kepentingan tertentu, maka dari itu media online berperan sebagai watchdog dan menginformasikan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN. Dengan adanya pemberitaan, media dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik mengenai pentingnya dalam menjaga netralitas bagi para ASN dan dampak terhadap isu netralitas. Hal ini dapat mendorong masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Media online juga memiliki peran sebagai keempat pilar demokrasi dan memegang peran yang penting dalam memastikan netralitas ASN agar tetap terjaga dengan mengedukasi, mengungkap, dan mendorong perubahan yang lebih baik. 1 Penegakan

netralitas ASN di daerah sangat bergantung pada komunikasi dan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), serta Kepala Daerah. Kepala daerah memegang posisi strategis dalam menegakkan netralitas ASN sebagai penentu terakhir yang memberikan tindakan atau sanksi kepada ASN yang tergabung pada pelanggaran. Komisi II DPR RI, melalui fungsi pengawasannya, dapat terus memantau sosialisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang netralitas ASN di tingkat pusat maupun daerah. Komisi II DPR RI juga dapat memastikan bahwa tidak ada tekanan politik dari kepala daerah yang menuntut netralitas politik dari ASN dalam birokrasi, serta mendorong kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan penegakan disiplin terhadap ASN di daerah. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebagaimana diangkat, ditempatkan, dipindahkan, serta diberhentikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dalam konteks ini ialah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga memiliki status pejabat politik. 1

Meskipun begitu, ASN diharapkan dapat mempertahankan sikap netral guna menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya yaitu sebagai pelayan publik, pembuat kebijakan, atau pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam pengelolaan anggaran pada birokrasi. Dilema posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini membuat rentan dimanfaatkan oleh pejabat politik atau pemegang kuasa untuk mempertahankan atau memperoleh kewenangan dan kekuasaan mereka, yang dapat mengakibatkan pelanggaran prinsip netralitas. 1

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu menjadi perhatian, terutama menjelang kontestasi politik. Aparatur Sipil Negara (ASN) diharapkan agar menjaga sikap profesional mereka dan tidak boleh memihak pada pasangan politik yang akan bersaing dalam Pemilu. 1 Banyaknya laporan pelanggaran netralitas ASN pada tahun 2023 hingga 2023 menunjukkan 1 bahwa potensi pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat meningkat, terutama menjelang penyelenggaraan Pemilu. Walaupun Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh mempunyai hak pilih pada setiap proses demokrasi, sebagai pelaksana kebijakan, mereka perlu menunjukkan etika netralitas

sebagai cara untuk mengkritik apabila terdapat pelanggaran politik terbuka pada lingkup administrasi publik. Dalam konteks pelanggaran netralitas oleh ASN, terutama banyak berlangsung pada pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah. Saat ini, tanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditempatkan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai ujung tombaknya. Dengan kata lain, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki otoritas agar mengambil tindakan selaras pada rekomendasi yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berhubungan dengan pelanggaran netralitas yang dilaporkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Badan Kepegawaian Daerah/Inspektorat (BKD). <sup>1</sup> Bawaslu dan BKD/Inspektorat di setiap lembaga memegang peran sebagai penerima pengaduan terkait pelanggaran netralitas, baik yang berasal dari masyarakat, pengamat pemilu, maupun pasangan calon (Paslon). Pengaduan mengenai pelanggaran tersebut kemudian dilaporkan kepada KASN, yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Firman Safrizal, 2024) Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah individu yang dipilih oleh pemerintah yang akan melangsungkan tugas sebagai gubernur, bupati, ataupun wali kota yang masa jabatannya berakhir sebelum tahun 2024. Meskipun biasanya pejabat kepala daerah hanya bertugas dalam jangka waktu singkat, dalam konteks Pemilu serentak 2024, mereka dapat menjabat selama dua tahun ataupun bahkan lebih sesuai dengan kesepakatan. Menurut Lip Ilham Firman selaku asisten Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terdapat lima p utama dalam pelanggaran yang dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni, intervensi politik, spoil system, budaya paternalistis birokrasi, ketidakpahaman akan regulasi, dan kekerabatan (kominfo.go.id, 2023). Perbedaan dalam cara menerbitkan pemberitaan yang dilakukan media nasional Kompas.com dan Repubilka Online membuat riset ini dilakukan, sehingga diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kedua media pemberitaan tersebut. Perbedaan media Kompas.com dan Republika Online dalam cara menyampaikan berita terkait berita

netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan presiden 2024 terdapat pada beberapa artikel dalam kedua portal media tersebut. Pemberitaan dengan kasus tersebut memiliki pandangan yang berbeda mulai dari judul hingga isi berita yang ditampilkan oleh media Kompas.com yaitu dalam pemberitaannya berjudul “ Saling Tuduh Soal Netralitas ASN Jalan g Pemilu 2024 , berita tersebut banyak mendapat reaksi publik baik secara online atau offline karena putra Presiden Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka telah resmi berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai capres dan Cawapres. Sedangkan pada media Republika Online menampilkan pemberitaan dengan judul “Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pemilu 2024 , setelah ditetapkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, muncul spekulasi dan tuduhan yang dilakukan oleh ASN, tuduhan tersebut disebabkan karena banyak kecurangan selama penyelenggaraan pemilu 2024. Dalam Pemberitaan yang dilakukan kedua media nasional tersebut, sangat terlihat bagaimana cara kedua media nasional tersebut dalam memberitakan suatu masalah yang sama dengan menggunakan judul yang berbeda yang tentunya dapat mempengaruhi bagaimana cara pembaca untuk menginterpretasikan isi berita tersebut. Peneliti berusaha untuk menganalisis kerangka berita yang digunakan oleh kedua media tersebut dan konstruksi sosial yang dibangun. Selain berita diatas, peneliti juga menemukan pemberitaan pada media Kompas.com lebih menjelaskan pengungkapan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN dalam pemilihan Presiden 2024 dengan memberikan data-data yang faktual serta penggunaan idiom lebih kearah sarkasme atau sindiran dalam konteks pelanggaran netralitas. Sedangkan pada media Republika Online lebih menjelaskan solusi dalam peringatan netralitas yang dilakukan oleh ASN dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi ASN selama penyelenggaraan pemilihan Presiden 2024, namun Republika Online tidak menunjukkan data-data terkait pelanggaran netralitas selama pemilihan presiden 2024. KASN, sebagai lembaga pengawas independen, berharap bahwa insiden- insiden pelanggaran di dalam

birokrasi dan di kalangan ASN di kementerian/lembaga/daerah dapat mengalami penurunan dari jumlah 1.678 pelanggaran netralitas ASN yang tercatat pada periode 2020-2022. Berdasarkan data KASN, pelanggaran netralitas ini melibatkan motif pemanfaatan sumber daya birokrasi, termasuk dukungan program, fasilitas, dan kecenderungan untuk mendukung calon tertentu. Penyelenggaraan Pemilu serentak pada semua wilayah Republik Indonesia yang berhubungan erat pada tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) saat melindungi netralitas. 1 Hal ini telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, yang menekankan peran ASN sebagai pelaksana kebijakan yang harus terbebas dari pengaruh politik dan aktivitas yang tentunya akan mendapat kerugian negara seperti korupsi, kolusi, serta nepotisme. Ketentuan lebih rinci tentang netralitas ASN pada pemilihan umum juga dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pada Pasal 4 ayat 12 hingga ayat 15. Terdapat beberapa larangan pada pasal tersebut dan mencakup pemberian dukungan pada calon petahana pada bentuk mengikuti kampanye, pemakaian fasilitas jabatan, dan pengambilan keputusan yang tidak adil. Dari tahun 2015 hingga 2021, KASN sudah menerima lebih dari 3.000 laporan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran-pelanggaran ini mencakup berbagai kegiatan, seperti partisipasi dalam kampanye dan memberikan dukungan kepada peserta kontestasi politik melalui media sosial, penyelenggaraan aktivitas yang menunjukkan netralitas terhadap salah satu kontestan 2 politik, hingga pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta kontestasi politik (kompas.com, 15 Oktober 2022). Mengingat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah bersifat final dan mengikat tentang dibatalkan pemotongan periode jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Nomor 143/PUU-XXI/2023 pada akhir Desember 2023, keputusan tersebut yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan yang mengharuskan kepala daerah pemilihan tahun 2018 serta baru

dilantik pada tahun 2019 berhenti akhir tahun 2023 (Kompas.com, 2024). Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditetapkan dalam Pasal 201 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai perubahan Kedua atas UU No 1/2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1/2014 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Dalam setiap proses pemilihan umum atau Pemilu, netralitas ASN menjadi isu yang krusial. Netralitas ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan serta penyelenggara pemerintahan cenderung penting agar menjaga integritas serta keadilan dalam demokrasi. Namun, sering kali terdapat pelanggaran netralitas yang dapat memengaruhi proses demokrasi itu sendiri. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022, tercatat 1.678 pelanggaran netralitas ASN, mencakup pemanfaatan sumber daya birokrasi untuk mendukung calon tertentu. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dan memengaruhi integritas pemilihan, menggiring hasil pemilihan pada satu pihak. Keterlibatan ASN dalam kegiatan politik dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Salah satu dampak yang merugikan dari pelanggaran netralitas ASN adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Dalam beberapa kasus, ASN yang terlibat secara politik dapat dianggap tidak objektif dalam menjalankan tugasnya, mengancam prinsip demokrasi yang harusnya dijadikan dasar kehidupan berbangsa serta bernegara. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk mendorong dan memahami pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Solusi pertama adalah dengan meningkatkan sosialisasi terkait aturan dan etika netralitas kepada ASN. Dukungan dari pemerintah dan lembaga pengawas, seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), perlu ditingkatkan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran dengan tegas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran netralitas juga sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan dapat meningkatkan integritas demokrasi. Melibatkan lembaga-lembaga independen seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat

memberikan jaminan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan bebas dari campur tangan politik. Isi berita dalam media massa adalah kumpulan tulisan ataupun informasi yang, baik dengan sengaja maupun tanpa disengaja, memiliki potensi untuk mengubah pandangan masyarakat sebagai penerima informasi. Isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan, yang sering kali mencakup masalah kebobrokan dalam tingkat pusat ataupun daerah, membuat topik ini cenderung sensitif untuk masyarakat luas. Saat media massa mengintensifkan serta selalu melakukan publikasi berita berkaitan dengan isu kebobrokan tersebut, perhatian masyarakat pun semakin meningkat. Selama ini, informasi yang disajikan berbagai jenis media massa, kerap dianggap sebagai representasi fakta yang benar. Fakta-fakta ini biasanya didapatkan dari data grafis ataupun kutipan narasumber yang kemudian diolah menjadi sebuah berita. Proses penulisan berita oleh jurnalis melibatkan penggunaan informasi yang bersifat faktual dan diharapkan mencerminkan kebenaran dari kenyataan yang ada. Seorang jurnalis, yang bertanggung jawab untuk menulis berita, diharapkan mampu mengesampingkan netralitas pribadi ataupun kelompok tertentu. Kondisi ini dilakukan untuk berita yang dihasilkan menjadi fakta yang murni dan objektif, mencerminkan realitas tanpa adanya maksud terselubung dari penulis ataupun media massa itu sendiri. Penting untuk memahami bahwa integritas jurnalis dan media massa menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disajikan. Media massa berfungsi untuk sumber informasi yang mencukupi kebutuhan kegiatan serta informasi pada tiap khalayak ataupun individu. Istilah "media massa" mulai dipergunakan di tahun 1920-an dengan merujuk pada golongan media yang dengan khusus diciptakan agar mencapai audiens yang sangat luas. Tingkat kebutuhan pada media massa cukuplah lebih tinggi pada masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah, dibandingkan dengan masyarakat berpendapatan tinggi. Ini karena masyarakat ekonomi rendah memiliki tingkat akses terbatas dan keterbatasan pilihan pada media massa, sehingga mereka lebih bergantung

pada informasi yang disediakan oleh media massa. Masyarakat ekonomi tinggi, di sisi lain, memiliki akses dan pilihan yang lebih banyak terhadap media massa. Mereka juga memiliki kemampuan untuk langsung mendapatkan informasi dari sumber atau pakar, tanpa harus mengandalkan media massa tertentu. Penjelasan ini menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap media massa sangat tergantung pada faktor ekonomi dan tingkat akses informasi. Namun, penting untuk diingat bahwa informasi yang dipaparkan pada media massa yang memiliki sifat satu arah. Ketika seseorang membaca, melihat, atau mendengarkan suatu pemberitaan, aktivitas tersebut tidak hanya terbatas pada konsumsi informasi semata. Pemikiran individu mampu terkonstruksi oleh isu serta konten yang terdapat dalam siaran tersebut. Pada titik inilah, penulis atau media yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kondisi tersebut agar mengedarkakan berita yang tidak seimbang, dengan tujuan menggiring pendapat publik sesuai dengan agenda tertentu yang mungkin tidak selalu baik ataupun berpihak kepada publik. Media massa memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi publik terhadap suatu peristiwa atau isu. Hal ini dapat membuat pihak yang seharusnya dianggap benar menjadi terlihat salah, dan sebaliknya. Oleh karena itulah, profesi jurnalis, yang bertanggung jawab atas kegiatan komunikasi massa, harus tunduk pada kode etik serta hukum yang khusus diciptakan pada profesi jurnalistik. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemberitaan yang disajikan oleh media massa tetap objektif, jujur, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Tabel 1.1 Total Berita 4 Media Nasional Media Total  
Berita (Februari 2023 – September 2023) Kompas.com 197 Berita Republik  
a Online 162 Berita Detik.com 134 Berita CnnIndonesia.com 103 Berita  
(Sumber: Olahan Peneliti, 2024) Peneliti memilih dua media nasional,  
yaitu Kompas.com serta Republika Online dan tentunya dalam kedua  
media tersebut terdapat perbedaan dalam memberitakan netralitas asn  
dalam pemilu 2024. Peneliti memilih media Kompas.com karena cenderung  
melakukan pendekatan yang lebih pluralistik dan mencoba untuk menjaga

keseimbangan dalam menyajikan berita yang mengakomodasikan berbagai aspek politik dan Kompas.com juga menekankan independensi dan profesionalisme dalam memberikan berita tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu 2024. Lain dari itu, Kompas.com pada mesin pencariannya didapatkan keyword “Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024” sebanyak 65 hasil telah ditemukan mulai dari bulan September 2023 hingga Januari 2024. Hal tersebut merupakan alasan tambahan yang akan digunakan peneliti agar memilah media nasional Kompas.com sebagai unit observasi sebab Kompas.com dalam memberikan perspektif pemberitaan cenderung netral moderat dan memiliki pendekatan pada berita yang sesuai dengan data dan fakta. Sedangkan, peneliti memilih media Republika Online karena cenderung lebih memberikan perspektif secara normatif yang berlandaskan kepada moralitas dan Republika Online lebih kritis terhadap pemerintah, terutama berita tentang isu-isu yang berhubungan dengan keadilan sosial dan kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, Republika Online dalam mesin pencariannya ditemukan keyword “Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024” sebanyak 61 hasil yang ditemukan mulai dari bulan September 2023 hingga Januari 2024. Berita yang dipublikasikan oleh kedua media nasional tersebut semakin melonjak dikarenakan sudah mulainya masa kampanye dan penetapan nomor urut capres dan cawapres serta alasan peneliti dalam mengambil periode September 2023 hingga Januari 2024 dikarenakan pada saat periode tersebut telah dimulai masa pencalonan dan kampanye calon presiden serta calon wakil presiden. Pemberitaan di media online sering kali berisiko kesalahan karena media tersebut cenderung mengejar kecepatan dalam menyampaikan berita, kadang-kadang melebihi tingkat ketepatan fakta (Faisal, 2021: 85). Selain itu, media massa memiliki latar belakang dan kepentingan yang beragam dalam penyajian berita. Jurnalis juga memiliki keterampilan yang berbeda-beda dalam menulis berita objektif, sehingga hasilnya sering kali bersifat subjektif. Pengemasan berita dapat menonjolkan makna atau pesan tertentu, karena setiap media memiliki cara pengemasan atau framing sendiri untuk

menyoroti aspek-aspek tertentu melalui penggunaan kata-kata, gambar, dan elemen-elemen lainnya (Febriyanti & Karina, 2021:147). Dalam dunia media online, kecepatan sering kali diutamakan, dan ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penyampaian informasi. Media massa, dengan berbagai latar belakang dan kepentingan, juga memiliki pengaruh terhadap cara berita disajikan. Keterampilan jurnalis yang berbeda dapat menghasilkan berita yang bersifat subjektif. Pengemasan berita, melalui penggunaan kata-kata dan elemen visual, dapat menonjolkan makna atau pesan tertentu sesuai dengan perspektif media tersebut. Oleh karena itu, penting dalam memahami bahwa setiap media massa memiliki cara tersendiri dalam menyajikan suatu berita dan dapat membuat pengaruh dalam cara kita memahami suatu informasi. Pandangan konstruktivisme jurnalis tidak dapat disembunyikan karena jurnalis adalah orang yang sangat penting dalam membuat berita. Di media massa, jurnalis bukan hanya melaporkan fakta atau temuannya, tetapi juga memberikan penafsiran pribadi mereka tentang kejadian tersebut sebelum dimasukkan ke dalam berita. Media massa dan jurnalis berfungsi sebagai penjaga atau pengawas yang melihat kegiatan pemegang berkuasa. Dikarenakan kekuatan ekonomi serta politik tidak merata di masyarakat, mereka yang memiliki kekuasaan mungkin melangsungkan tindakan yang tidak adil. Jurnalis, berkat kemandirian mereka, dapat bersuara lebih keras daripada pemerintah ataupun lembaga hukum saat mengawasi kegiatan mereka yang berkuasa (Wendratama, 2017). Pekerjaan seorang jurnalis dalam membuat berita, terdapat suatu konsep yang disebut framing atau pembedaan. Framing ini bertujuan untuk membentuk pendapat masyarakat dan mengarahkan cara pandang mereka terhadap sebuah kejadian ataupun peristiwa. Framing bukan berarti berbohong, tetapi jurnalis ataupun media berusaha menyajikan fakta dengan halus dengan memilih informasi, menekankan aspek tertentu, memilih kata-kata, bunyi, dan gambar, bahkan kadang-kadang memotong atau menghilangkan informasi yang seharusnya disampaikan. Prinsip yang dipegang oleh Bill Kovach, seorang pakar jurnalistik, adalah

"jangan pernah menyesatkan audiens , yang berarti seorang jurnalis harus jujur saat menyajikan informasi kepada masyarakat, tanpa menambahkan atau mengurangi informasi yang diperoleh (Muzakkir, 2020). 4 Framing pemberitaan bisa dipengaruhi dengan ideologi seorang jurnalis serta kepemilikan media massa tempatnya bekerja. Jikalau pemilik media massa memiliki keterlibatan atau kepemimpinan dalam suatu partai politik, kemungkinan besar media massa tersebut akan cenderung membingkai berita sesuai dengan kepentingan partai politik tersebut. Pembingkai berita dapat terlihat ketika suatu pemberitaan menonjolkan aspek atau pesan tertentu, sehingga perhatian publik lebih tertuju pada kondisi tersebut. Karena terdapat pembingkai berita ini, satu kejadian ataupun peristiwa yang sama mampu diinterpretasikan secara berbeda, menyoroti aspek tertentu sesuai dengan perspektif yang diberikan oleh media. Sebagai respons terhadap potensi manipulasi informasi dan peran penting media massa, adanya kode etik jurnalistik yang tetap diharuskan untuk dipatuhi oleh para jurnalis. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyajian informasi tetap jujur, akurat, dan tidak condong kepada kepentingan tertentu, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang seimbang dan obyektif. Dalam membandingkan cara penyajian berita di dua platform media daring yang sudah dipaparkan tersebut, peneliti memakai metode analisis framing Pan serta Kosicki. Model analisis inilah yang bertujuan untuk menyelidiki dimensi struktural dari sebuah teks berita. Keunikan model analisis ini terletak di pendekatan terhadap wacana media, yang berarti sebuah proses kesadaran sosial serta melibatkan tiga sumber utama, yaitu jurnalis, sumber informasi, serta pembaca ataupun audiens. Pendekatan ini menguji wacana media dengan memfokuskan pada teks media yang bersifat empiris, mencakup struktur sintaksis, skrip, tema, serta retorik. 6 9 10 Penelitian ini memakai sejumlah penelitian terdahulu untuk rujukan, penelitian pertama berjudul 1 3 "Konstruksi Berita CNN INDONESIA Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 (Analisis Framing Perspektif Zhongdang

Pan & Gerald M Kosicki **6 9 10** yang diteliti oleh Zahra Febriyanti. **6 10** Metode framing Pan & Kosicki dengan hasil analisis bahwa pemberitaan mengenai konstruksi berita CnnIndonesia.com tentang Gibran Rakabuming pasca Pilkada serentak 2020, CnnIndonesia.com mengkonstruksi realitas sosial tentang Gibran Rakabuming Raka pasca Pilkada serentak memiliki unsur yang dominan pada keberpihakan medianya. **10** Sebagai media harus profesionalisme dan loyal terhadap publik agar memiliki keseimbangan antara kepentingan media, peristiwa/tokoh yang diberitakan, dan penyampaian kepada publik. Pada penelitian yang sedang dilakukan memiliki pembaharuan terkait metode analisis dan unit observasi, penelitian sebelumnya membahas pemberitaan konstruksi berita CnnIndonesia tentang Gibran Rakabuming Raka setelah Pilkada serentak kota Solo 2020, sedangkan penelitian ini berfokus membahas peningkatan pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024 dengan menggunakan metode analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kociki pada media Kompas.com dan Republika Online. **2**

Penelitian kedua berjudul **2** "Analisis Framing Pemberitaan Konflik Ganjar Pranowo Versus Puan Maharani Pada Media Online Detik.com" **2** yang diteliti oleh Muhammad Zul Fithri dengan memakai metode penelitian analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kociki dengan perolehan analisis bahwa media Detik.com sebagai media terpopuler di Indonesia seharusnya memberikan penyampaian informasi yang berimbang seperti menggunakan headline berita yang lebih jelas dan tidak berlebihan. **2 11** Berdasarkan analisis struktur skrip, detik.com belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+1H. **2** Dalam tiga dari lima berita yang dianalisis, unsur " where " atau lokasi kejadian tidak disebutkan. **2** Selain itu, unsur " how " sering disajikan secara kurang mendalam, sehingga informasi yang diberikan menjadi kurang jelas. Analisis struktur tematik dan retorik pada pemberitaan konflik Ganjar Pranowo versus Puan Maharani menunjukkan bahwa detikcom belum bersikap berimbang. Detik.com cenderung menyoroti Ganjar Pranowo sebagai pihak yang bersalah, sementara pandangan Puan Maharani terkait konflik tersebut kurang diangkat. Pemilihan gambar juga kurang optimal, sering

menggunakan foto yang sama seperti dalam berita sebelumnya. Pada penelitian ini memiliki perbedaan di peristiwa pemberitaan yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024 pada media Kompas.com dan Republika Online. Penelitian ketiga yang dipergunakan untuk rujukan penelitian ini yang berjudul “Analisis Framing Dalam Pemberitaan Politik Di Tvonenews.com (Studi Kasus Pemilihan Presiden 2024 yang diteliti oleh Pangeran Siagian yang memakai metode analisis Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian ini ialah Tvonenews.com melakukan framing pemberitaan yang cenderung tidak seimbang terhadap tiga pasangan calon dalam Pemilihan Presiden 2024. Ketidakberimbangan tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi persepsi publik dan memicu beragam interpretasi di kalangan masyarakat. Pada penelitian ini mempunyai perbedaan pada unit analisis dan unit observasi dan media online yang digunakan yaitu Kompas.com dan Republika Online sebagai unit observasi, lalu penelitian ini berfokus membahas pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024.

1.2. Rumusan Masalah Menurut latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana pembingkai pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2024 pada Kompas.com dan Republika Online Periode September 2023 – Januari 2024? 1.3.

Tujuan Penelitian Terdapat tujuan penelitian yang ingin diraih oleh peneliti adalah sebagai berikut: Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pembingkai pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2024 pada Kompas.com dan Republika Online Periode September 2023 – Januari 2024. 5 1.4. Manfaat Penelitian Apabil a penelitian ini telah usai dan selesai, diharapkan hasil yang didapatkan mampu memberikan manfaat. Manfaat yang diinginkan oleh peneliti sebagai berikut: 1.4.1. Manfaat Akademis Secara akademis diinginkan mampu menambah pengetahuan yang telah diketahui dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya dalam penelitian framing. Selain itu, diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendorong kemajuan penelitian

tentang beragam peristiwa dan subjek. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu dijadikan referensi untuk penelitian metode analisis yang berbeda, contoh analisis studi kasus. 1.4.2. Manfaat Praktis Penelitian ini memiliki fungsi sebagai sumber referensi bagi masyarakat, terutama pembaca media daring yang ingin melihat bagaimana cara pemberitaan dan penyajian informasi terkait kejadian netralitas ASN dalam Pilpres 2024.

6 6 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Penelitian Terdahulu Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu No Judul, Penulis, Tahun Afiliasi Universitas Metode Penelitian Kesimpulan Saran Perbedaan dengan riset berikut 1. 6 9 Konstruksi Berita Cnn Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 : Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki, Zahra Febriyanti, 2021 Universitas Paramadina Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M 10 Kosicki Tujuan dilakukan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana analisis framing Pan & Kosicki mengenai berita politik media Cnn Indonesia mengenai Gibran Rakabuming Raka setelah Pilkada serentak Kota Solo 2020. Temuan penelitian berdasarkan ke- empat struktur framing Pan & Kosicki menunjukkan bahwa CnnIndonesia.co m cukup berpihak terhadap pemberitaan Gibran Rakabuming Raka setelah Pilkada Kota Solo 2020. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dengan menggunakan media online dan berita yang berbeda, agar mampu melihat perbedaan hasil analisis dan mendapatkan hasil yang berbeda. 9 10 Penelitian berikut menggunakan analisis framing Pan & Kosicki tentang konstruksi berita Gibran Rakabuming Raka setelah Pilkada serentak Kota Solo 2020. Sedangkan penelitian yang akan dijalankan membahas netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilihan presiden 2024 serta menggunakan analisis framing Pan & Kosicki di dua media online Kompas.com dan Republika Online. 2 2. Analisis Framing Pemberitaan Konflik Ganjar Pranowo Versus Puan Maharani Pada Media Online Detik.com, Muhammad Zul Fithri, 2023. Universitas Islam Negri Sumatera Utara Analisis Framing Zhongdang Pan & Gerald M.Kosicki. 2 Berdasarkan analisis, detikcom belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+1H. 2 Dalam tiga dari

lima berita yang dianalisis, unsur "where" atau lokasi kejadian tidak disebutkan.

2 Selain itu, unsur "how" sering disajikan secara kurang mendalam.

Pada pemberitaan konflik Ganjar Pranowo versus Puan Maharani menunjukkan bahwa detik.com belum bersikap berimbang.

Saran dalam penelitian ini adalah penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jenis topik yang berbeda serta dapat menjelaskan struktur analisis framing Pan & Kosicki secara detail. Penelitian yang sedang dijalankan menggunakan metode penelitian framing Pan dan Kosicki dengan melihat pembedaan pemberitaan dari dua media nasional Kompas.com dan Republika Online. Penelitian yang sedang dijalankan akan membahas bagaimana netralitas ASN dalam pemilihan presiden 2024.

2 7 Detik.com cenderung menyoroti Ganjar Pranowo sebagai pihak yang bersalah, sementara pandangan Puan Maharani terkait konflik tersebut kurang diangkat.

3. Analisis Framing Dalam Pemberitaan Politik Di Tvonenews.C om

(Studi Kasus Pemilihan Presiden 2024), Pangeran Siagian, 2024. 7 Universitas

Negeri Medan Analisis Framing Model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Hasil

penelitian menunjukkan pemberitaan yang dilakukan oleh media

Cnnindonesia.co m dan Antaranews.com sama-sama memberikan kritik kepada

pihak-pihak yang terlibat dalam tragedi stadion Kanjuruhan Malang yang

telah menewaskan 135 orang. Cnnindonesia.co m lebih menunjukkan tindakan

suporter Arema yang masuk lapangan setelah usai pertandingan,

sedangkan Antara news.com lebih menunjukkan aspek penembakan gas air

mata yang memiliki peraturan dan regulasi dalam penggunaannya. Saran dalam

penelitian merupakan acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki

keterkaitan dengan pemberitaan sebuah media dalam momen politik yaitu

pemilihan presiden 2024. Penulis memberikannya kepada media di

Indonesia yang akan melakukan pemberitaan harus sesuai dengan peristiwa

yang terjadi. Riset berikut membahas tentang pemberitaan politik di

Tvonenews.com dalam momen Pilpres 2024 dengan menggunakan analisis

framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Sedangkan pada penelitian

yang sedang dijalankan membahas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam

pemilihan Presiden 2024 dengan menggunakan metode framing Pan dan

Kosicki . (Sumber: Olahan Peneliti) Pada penelitian terdahulu, peneliti menetapkan langkah sistematis dari teori serta konsep yang akan dipergunakan pada riset berikut. Dalam penelitian terdahulu terdapat kesamaan dalam pokok pembahasan yaitu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 6 9

Berikut perbedaan serta perbandingan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni: Dalam penelitian pertama yang memiliki judul Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya, salah satunya adalah penelitian oleh Zahra Febriyanti berjudul 1 "Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020 (Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki) 6 9 .

Penelitian tersebut menggunakan metode framing Pan & Kosicki, yang menunjukkan bahwa pemberitaan CNNIndonesia.com cenderung membangun realitas sosial dengan keberpihakan terhadap Gibran Rakabuming Raka pasca Pilkada 2020. Peneliti menekankan pentingnya profesionalisme dan loyalitas media terhadap publik untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan media, objek berita, dan penyampaiannya. Studi yang sedang dilakukan memperbarui pendekatan dengan fokus yang berbeda. Jika penelitian sebelumnya membahas konstruksi berita CNNIndonesia.com tentang Gibran Rakabuming Raka, penelitian ini berfokus pada framing pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024, menggunakan metode framing Pan & Kosicki pada media Kompas.com dan Republika Online.

2 8 Penelitian kedua berjudul 2 "Analisis Framing Pemberitaan Konflik Ganjar Pranowo Versus Puan Maharani Pada Media Online Detik.com 2 oleh Muhammad Zul Fithri menggunakan metode framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Detik.com, sebagai media populer di Indonesia, seharusnya menyajikan informasi yang lebih berimbang, termasuk penggunaan headline yang jelas dan tidak berlebihan. Berdasarkan hasil analisis Detik.com belum sepenuhnya memenuhi unsur 5W+1H, dengan unsur "where" sering tidak disebutkan dan "how" disajikan secara kurang mendalam.

2 Analisis struktur tematik dan retorik mengungkapkan bahwa Detik.com cenderung menyoroti Ganjar Pranowo sebagai pihak yang bersalah,

sementara pandangan Puan Maharani kurang diangkat. Pemilihan gambar juga dinilai kurang optimal, sering kali menggunakan foto yang sama dari berita sebelumnya. Penelitian ketiga yang menjadi referensi berjudul "Analisis Framing Dalam Pemberitaan Politik di Tvonenews.com (Studi Kasus Pemilihan Presiden 2024) oleh Pangeran Siagian menggunakan metode analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tvonenews.com cenderung melakukan framing pemberitaan yang tidak seimbang terhadap tiga pasangan calon dalam Pemilihan Presiden 2024. Ketidakberimbangan ini berpotensi memengaruhi persepsi publik dan menimbulkan berbagai interpretasi di masyarakat.

**12** 2.2. Teori dan Konsep 5 2.2 1 Analisis Framing Secara sederhana, analisis framing ialah upaya untuk memahami cara media membingkai adanya realitas, termasuk peristiwa, aktor, kelompok, serta lainnya. Proses pembingkaiannya ini melibatkan interpretasi dan pembentukan makna tertentu terhadap realitas sosial. Sebagai perolehannya, liputan media dalam halaman tertentu mencerminkan cara media menginterpretasikan serta memperlihatkan peristiwa tersebut. Fokus analisis framing ialah pada pemahaman media terhadap realitas dan tanda-tanda yang digunakan oleh mereka untuk mengkomunikasikan realitas tersebut (Eriyanto, 2018) Framing bisa diartikan dengan suatu pembingkaiannya sebuah peristiwa. Berdasarkan penjabaran dari Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, adapun perbedaan dengan topik dan tema, di mana tema merujuk pada suatu konsep yang mengintegrasikan berbagai makna yang berbeda menjadi suatu narasi yang terkait (Eriyanto, 2018). **2 7 8 11** Pada analisis framing Pan dan Kosicki, memiliki empat struktur yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, serta struktur retorik. Berikut analisis empat struktur menurut Pan dan Kosicki: 1. Struktur Sintaksis, menjelaskan bagaimana seorang jurnalis mengatur fakta dalam sebuah laporan berita melibatkan elemen-elemen seperti judul, paragraf pembuka ataupun lead, konteks informasi, dan penutup berita. 2. Struktur Skrip, menjelaskan bagaimana seorang jurnalis mengungkapkan fakta melalui laporan berita melibatkan unsur 5W + 1H. Kelengkapan unsur-unsur pemberitaan dijadikan

n indikator framing yang signifikan, meskipun tidak selalu ditemukan dalam setiap berita. Analisis skrip ini dimaksudkan agar memahami bagaimana media massa menggambarkan peristiwa pada suatu berita. 3. Struktur Tematik, menjelaskan bagaimana seorang jurnalis menggambarkan suatu fakta dalam tulisannya melibatkan pemilihan kata-kata dan hubungan antara kata-kata misalnya penggunaan kata "dan" ataupun kata-kata lainnya. Ini juga mencakup proposisi- proposisi yang dipakai saat menguraikan suatu peristiwa pada format berita. 4. Struktur Retoris, menjelaskan bagaimana seorang jurnalis menyoroti fakta yang diinginkan untuk disorot melibatkan elemen-elemen penting pada struktur retoris, termasuk pilihan kata, ungkapan, data grafis, serta gambar ataupun foto yang mendukung pesan yang disampaikan kepada audiens. 6 N Tabel

2.2. Kerangka Framing Pan dan Kosicki Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati Sintaksis (Cara Jurnalis menyusun sebuah fakta). 2 9 12 1. Skema

berita Headline, lead, latar, informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup. 9

Skrip (Cara jurnalis mengisahkan sebuah fakta). 2. Kelengkapan Berita 5W

+ 1H Tematik (Cara jurnalis menuliskan sebuah fakta). 1. Detail 2. Koherensi 3.

Bentuk Kalimat 4. Kata Ganti Paragraf, proporsi, kalimat, hubungan

antarkalimat Retoris (Cara jurnalis menekankan sebuah fakta). 1. Leksikon 2.

Grafis 3. Metafora Kata, idiom, gambar ataupun foto, grafif (Sumber:

Olahan Peneliti) N 9 Keempat struktur tersebut adalah serangkaian

langkah yang menunjukkan cara suatu informasi disajikan. Kebiasaan

ataupun hal yang ditekankan oleh jurnalis dalam memahami esrta

menanggapi suatu peristiwa bisa dilihat dari cara jurnalis merancang

serta menceritakan peristiwa pada bentuk berita, termasuk pemilihan kata

ataupun ungkapan yang dipergunakan dalam pemberitaan tersebut. Ini juga

mencakup penekanan ataupun penonjolan makna dari peristiwa pada berita.

Strategi ini dipergunakan oleh jurnalis untuk meyakinkan pembaca bahwa

berita yang dipublikasikan ialah akurat serta bisa dipercaya. Dalam

penelitian yang sedang dijalankan, peneliti akan memakai analisis framing

yang dinyatakan oleh Pan & Kosicki untuk mengetahui bagaimana

pembingkaihan pemberitaan netralitas ASN dalam Pilpres 2024 oleh media nasional Kompas.com serta Republika Online.

### 2.2.2 Aparatur Sipil Negara

Aparatur Negara merupakan perangkat-perangkat penting dari fungsi negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah bagian integral dari manajemen sumber daya manusia pemerintahan yang berada di bawah naungan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah penyelenggara negara yang berperan di seluruh tingkatan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatan administrasi negara sebagai tenaga penggerak birokrasi pemerintah (Aji Ibrahim, 2019). Aparatur Sipil Negara (ASN) merujuk pada profesi yang dijalankan oleh Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang bertugas pada berbagai lembaga pemerintah (Aji Ibrahim, 2019). Pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN), ASN dikategorikan menjadi dua, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, PNS memiliki hak atas gaji pokok, tunjangan, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi, namun PPPK mempunyai hak yang serupa termasuk gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, serta pengembangan kompetensi, namun tanpa hak atas pensiun yang diberikan kepada PNS (Aji Ibrahim, 2019).

### 2.2 3 Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Politik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014,

ataupun yang cenderung dikenal dengan sebutan UU ASN, merupakan peraturan yang mengatur berbagai aspek terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). UU ini ialah landasan regulasi yang bertujuan dengan mempromosikan terciptanya ASN yang berisikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sertapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mempunyai integritas, profesionalisme, netralitas, serta tidak terpengaruh oleh intervensi politik. Selain itu, ASN diharapkan bersih dari praktik korupsi, kolusi, sertapun nepotisme, dan dapat membagikan pelayanan publik yang baik kepada publik sertapun memainkan peran

penting dalam memperkuat persatuan serta kesatuan bangsa. Dengan terdapatnya UU ASN, dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang bertugas mengawasi penerapan norma dasar, kode etik, serta kode perilaku ASN, serta implementasi Sistem Merit pada kebijakan serta manajemen ASN di instansi pemerintah (Kasn, 2017). Pasal 2 UU ASN tahun 2014 menegaskan jika pelaksanaan kebijakan serta Manajemen ASN didasarkan dalam prinsip netralitas. Netralitas birokrasi merujuk pada suatu sistem di mana birokrasi tetap konsisten dalam memberikan pelayanan kepada publik, bahkan jika terjadi pergantian pimpinan. Maka, diperlukan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang netral pada seluruh bentuk aktivitas politik, tidak dipengaruhi, tidak memihak pada pihak politik tertentu, serta tidak terbebani oleh tekanan politik apa pun (Kasn, 2017). Berdasarkan penjabaran dari (Kasn, 2017), sikap netral dalam menghadapi pengaruh politik adalah kewajiban yang diharuskan kepemilikan oleh ASN. Setiap aparatur pemerintah yang memiliki interaksi langsung dengan masyarakat, ASN bertanggung jawab dengan memberikan pelayanan publik yang baik serta berinteraksi dengan masyarakat tanpa memihak pada politik. Netralitas terhadap hal-hal politik menjadi penting bagi ASN agar tidak terlibat dalam keanggotaan partai politik serta terhindar dari pengaruh politik yang mungkin mengarahkan mereka untuk memobilisasi massa ataupun khalayak demi kepentingan politik tertentu. *Political neutrality*, sebagai bagian dari prinsip *impartiality*, ialah hal yang penting dalam tugas-tugas seorang pegawai ASN. Meskipun mereka mempunyai hak untuk memilih, namun saat menjalankan tugas mereka, mereka harus tetap netral dari pengaruh politik. ASN dilarang menggunakan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu calon ataupun caleg dengan membuat program ataupun kegiatan tertentu. Mereka juga tidak boleh memanfaatkan anggaran ataupun fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertentu. Karena posisinya sebagai panutan di masyarakat, ASN tidak diperbolehkan menunjukkan dukungan kepada calon ataupun caleg tertentu. Mengajak bawahannya ataupun orang lain untuk memilih calon ataupun caleg tertentu dianggap sebagai pelanggaran serius yang bisa dikenai

sanksi berat. Undang-Undang Pemilu juga mengatur tentang larangan bagi pejabat politik dalam mengerahkan dukungan ASN dalam pemilu (Mokhsen, 2019). Dari laporan yang diterima oleh KASN, terlihat bahwa jumlah pelanggaran meningkat sebelum, selama, dan setelah berlangsungnya Pemilu. Pelanggaran yang umumnya dilaporkan berkaitan dengan dukungan yang ditunjukkan kepada calon melalui media sosial, kehadiran saat 10 calon mendaftar ke KPU, dan kehadiran dalam pertemuan antara calon dengan tokoh parpol dan tokoh masyarakat. Namun, banyak pegawai ASN yang mengaku turut memberikan dukungan finansial untuk pelaksanaan kampanye melalui penyelenggaraan berbagai acara oleh pihak lain (Mokhsen, 2019). Akan tetapi, pegawai-pegawai tersebut tidak mau mengungkapkan rincian dari praktik yang dilakukan. Departemen Keamanan Negara (KASN) menerima 403 laporan pelanggaran ASN pada pemilu 2024. Berdasarkan jumlah tersebut, sejumlah 183 ASN atau 45,4% di antaranya melakukan tindakan tidak jujur, sedangkan 97 ASN atau 53% dikenai sanksi denda atas laporan Pejabat Pembinaan Pribadi (PPK). Pada Pilkada serentak 2020, rata-rata adapun 2.034 laporan pelanggaran ASN. Dari jumlah tersebut, sejumlah 1.597 ASN ataupun 78,5% yakni telah mengaku bersalah, dan sebanyak 1.450 ASN atau 90,8% telah didenda (Muhammad, 2024). Imparsialitas merupakan prinsip penting saat terselenggarakannya pelayanan publik, tanggung jawab pemerintah serta pembangunan. Seluruh pegawai Badan Energi Negara (ASN) yang masuk dalam birokrasi harus menjaga rata-rata agar bisa menjalankan pekerjaannya dengan profesional. Jika melihat prinsip-prinsip birokrasi yang dijelaskan oleh para ahli teori dalam hal rasionalitas, patologi birokrasi, dan netralitas birokrasi, maka perdebatan tentang netralitas birokrasi telah berlangsung lama dalam korespondensi tentang eksternalitas. (Basri M, 2019) Berdasarkan penjabaran dari teori WGF Hegel, birokrasi pemerintahan berperan sebagai dialog antara negara dan masyarakat (civil society). Dalam dunia kemasyarakatan terdapat banyak kepentingan khusus, termasuk kepentingan pekerja dan pengusaha, sedangkan kepentingan tersebut diwakili oleh negara. Berdasarkan penjabaran dari

pemikiran tersebut, karena birokrasi berperan sebagai perantara antara dua kepentingan, maka birokrasi harus menempati posisi netral (Sudrajat, T. 2015). Undang-undang yang mengatur larangan perilaku tidak etis secara rinci tertuang di Pasal 4 Undang-Undang Kepegawaian Nomor 53 Tahun 2010 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN). Dukungan untuk presiden. Calon/Wakil Presiden, Panitia Perwakilan Rakyat, Panitia Perwakilan Daerah, serta Panitia Perwakilan Daerah (Putra, Sugyartha, & Suryani, 2022).

2.2 4 Berita5 Berita ialah informasi yang aktual, menarik, serta akurat yang dikatakan penting bagi banyak pembaca, pendengar, ataupun penonton. Walaupun suatu informasi adalah fakta, tetapi jika tidak dikatakan penting, aktual, serta menarik oleh sejumlah besar orang, informasi tersebut belum tentu menjadi materi berita. Jika unsur-unsur tersebut tidak tercukupi pada data yang akan disampaikan pada sebuah berita, serta redaktur memutuskan untuk tetap meliputnya, maka hasilnya kemungkinan besar tidak akan menarik bagi pembaca, pendengar, ataupun penontonnya. Maka, berita memiliki peran penting dalam memberikan informasi tentang peristiwa ataupun kejadian kepada khalayaknya untuk meningkatkan pengetahuan mereka (Ardi, 2016). Berdasarkan pendapat dari (Ardi, 2016) dalam buku *News Writing and Reporting* yang dinyatakan oleh James M. Neal dan Suzzane S. Brown jika berita baru ada setelah terjadi peristiwa. James M. Neal dan Suzzane S. Brown berpendapat jika kecenderungan, kondisi, situasi, serta interpretasi juga adalah bagian dari berita. Contohnya, kenaikan harga kebutuhan pokok adalah informasi yang signifikan untuk banyak orang. Kecenderungan ini membuat situasi serta kondisi yang menarik agar dibuat suatu berita. Di dalam masyarakat, situasi serta kondisi inilah yang bisa menghasilkan beragam interpretasi yang menarik untuk diberitakan. Berita adalah salah satu bentuk dari pesan-pesan komunikasi. Berdasarkan pendapat dari definisi ini, walaupun berbagai peristiwa memiliki perbedaan, namun terdapat kesamaan tertentu yang menjadi ciri khas dari berita, yaitu keberadaan elemen yang menarik perhatian, luar biasa, dan terkini.

Maka, sebuah peristiwa bisa diangkat menjadi berita apabila memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Tidak semua tulisan bisa diklasifikasikan sebagai berita, hanya yang berdasarkan fakta serta tidak memihak yang bisa masuk pada kategori berita. Mengetahui unsur-unsur yang ada dalam suatu berita menjadi hal yang krusial dalam proses pembuatnya. Ketidaktahuan terhadap unsur-unsur tersebut bisa mengakibatkan berita yang dihasilkan kurang informatif. Sebab, berita ialah narasi ataupun penjelasan tentang suatu kejadian ataupun peristiwa yang sedang menjadi sorotan ataupun topik hangat pembicaraan. Berita yang efektif dan informatif tentu mengandung beberapa unsur di dalamnya. Biasanya, dalam sebuah berita, terdapat enam unsur utama yang sering disebut dengan 5W + 1H, yakni apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, serta bagaimana (Adytya, 2020).

2.2.4.1 Nilai Berita Kriteria nilai berita menjadi panduan esensial bagi jurnalis, termasuk reporter dan editor, dalam menentukan fakta mana yang layak diangkat menjadi berita dan memilih judul yang lebih menarik. Panduan ini sangat krusial bagi reporter karena membantu mereka mengidentifikasi event mana yang perlu di-cover dan dilaporkan, serta mana yang tidak perlu dibahas. Sementara itu, bagi editor, kriteria ini bisa dibilang krusial dalam menimbang dan memilih berita mana yang paling penting dan menarik untuk dimuat, disiarkan, ataupun ditampilkan melalui media mereka ke publik. Dalam menentukan berita yang mengandung nilai, beberapa aspek ditekankan pada karakteristiknya, sementara lainnya lebih fokus pada ciri khasnya. Berdasarkan pendapat dari (Asep Syamsul M. Romli, 2014) berita ialah penyampaian informasi mengenai kejadian terkini. Namun, tidak setiap kejadian pantas untuk dilaporkan sebagai berita dan hanya yang sesuai dengan standar "nilai berita" yang dipertimbangkan layak untuk diberitakan. Nilai berita tersebut yakni: NN 11 1. Kebaruan (timeliness): Media massa, khususnya dalam platform online, perlu cepat menyediakan laporan tentang peristiwa terkini yang terjadi hari ini ataupun kemarin. Hal ini penting karena masyarakat cenderung tertarik pada kejadian yang

baru-baru ini terjadi, menjadikan kecepatan dalam mempublikasikan berita sebagai aspek krusial bagi media massa. 2. Kedekatan ( proximity ): Masyarakat cenderung tertarik pada peristiwa yang berlangsung di sekitar mereka karena hal tersebut membantu mereka merasa lebih terhubung dengan informasi tersebut, baik secara pribadi, lingkungan, ataupun sosial. 3. Penting ( significance ): Berita yang penting akan memberikan pengaruh kepada pembaca, berita yang dimaksud merupakan berita yang memiliki nilai konsekuensi. 4. Keterkenakalan ( prominence ): Berita yang membahas tokoh terkenal akan menarik minat pembaca. Namun, tidak hanya sosok tokoh terkenal, dapat juga dengan sebuah lokasi kejadian, opini, dan peristiwa. 5. Besaran ( magnitude ): Berita yang menjelaskan sebuah peristiwa akan berdampak bagi kehidupan masyarakat umum dan menarik rasa keingintahuan para pembaca berita. Dari enam nilai berita yang telah dijelaskan diatas, penelitian akan menilai berita menggunakan aspek proximity (kedekatan) karena fokusnya adalah pada netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu 2024. Peneliti memilih dua media nasional yaitu Kompas.com dan Republika Online, karena peneliti ingin melihat bagaimana media nasional tersebut membingkai suatu tema berita yang sama. Selain itu, kedua media nasional tersebut dapat menjangkau seluruh wilayah di Indonesia sehingga dapat memahami perbedaan dari cara pemberitaan di antara kedua jenis media nasional tersebut.

#### 2.2.4.2 Fungsi Media Sebagai Watchdog Pada pemberitaan tentang netralitas ASN dalam Pilpres 2024, media online seperti Kompas.com serta Republika Online, peran media massa sebagai platform teknis dan struktur sosial yang mendukung komunikasi antarmanusia memegang peran kunci dalam demokratisasi. Terutama, media membantu memastikan bahwa informasi dan gagasan bisa mengalir secara bebas. Dalam lingkungan di mana informasi dan ide bisa bergerak secara bebas, disertai dengan kritik konstruktif dan pengawasan yang cermat terhadap pelaksanaan tugas negara dan pemerintahan, media diharapkan bisa berfungsi sebagai penjaga keamanan serta sistem pemberi

peringatan dini pada kemungkinan kesalahan yang terjadi (Sekretariat Dewan Pers, 2016). Media massa berperan sebagai penjaga keamanan dengan memantau aktivitas lembaga- lembaga sosial, budaya, dan politik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Sebagai penjaga keamanan, media bertugas mengawasi individu ataupun entitas yang memegang kekuasaan, baik di ranah politik (pemerintahan), organisasi non-pemerintah, maupun sektor swasta. Media diinginkan bisa menjadi bagian integral dari mekanisme pengawasan pada proses demokrasi di Indonesia, oleh karenanya bisa mendorong masyarakat agar memahami sistem politik yang demokratis dan membuat pilihan yang lebih baik (Salam, 2018). Peneliti menggunakan konsep ini agar mengetahui framing pemberitaan media online dari netralitas ASN pada Pilpres 2024.

### 2.2.5 Jurnalisme Online

Jurnalisme Online merupakan mekanisme mengumpulkan, menulis, mengedit, serta menyebarkan berita secara daring melalui internet. Jurnalisme online dijelaskan untuk kegiatan melaporkan fakta yang dihasilkan serta disebarluaskan melalui internet. Selain sebagai platform publikasi berita melewati internet (media online), jurnalisme online mencakup semua proses peliputan yang banyak dilakukan secara daring. Pengamatan terhadap pembaruan status di media sosial, topik yang sedang tren, ataupun yang viral, kemudian diolah menjadi sebuah berita, adalah praktik baru dalam industri jurnalistik (Romeltea, 2018). Jurnalisme Online merujuk pada kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh individu di platform daring seperti situs web, blog, forum, dan media sosial. Seorang jurnalisme online diharapkan untuk mengikuti kode etik jurnalistik dan menjalankan tugas-tugas jurnalistik seperti biasa, perbedaannya terletak pada media yang dipergunakan agar menyajikan berita. Adinegoro menyatakan bahwa jurnalisme mempelajari berbagai aspek penyaluran berita, tidak hanya dalam media cetak, tetapi juga dalam teater, film, ataupun pertemuan lainnya (Ivony, 2017).

5 Jurnalisme Online dikenal sebagai representasi dari generasi ketiga dalam dunia jurnalisme. 2 3 4 5 11

Generasi pertama jurnalisme mencakup media cetak misalnya surat

kabar ataupun majalah, sedangkan generasi kedua ialah jurnalisme elektronik yang memanfaatkan media seperti radio ataupun televisi. **3 4 5** Jurnalisme Online juga dikenal dengan sejumlah istilah lain seperti Jurnalisme Internet, Jurnalisme Website, Jurnalisme Digital, Jurnalisme Siber, ataupun Jurnalisme Judul. Saat ini, setiap jurnalis diharapkan memiliki kemampuan dalam jurnalisme online sebab hampir seluruh media cetak serta elektronik mempunyai versi daring agar bisa diakses oleh pembaca global (Ivony, 2017). **3 4 5 11** Berdasarkan pendapat dari Paul Bradshow, terdapat lima prinsip dasar jurnalisme online yang disingkat dengan BASIC, yaitu: Brevity, Adaptability, Scannability, Intercreativity, dan Community (Dewi, 2020). 1) Brevity (ringkas) Penulisan harus singkat, tidak bertele-tele, dan mudah dipahami. **3 4 8** Penting untuk merangkum tulisan panjang akan menjadi tulisan pendek agar mudah dibaca serta dimengerti dengan cepat. Prinsip dasarnya adalah Keep it short and simple (KISS). **3 4** 12 2. Adaptability (adaptasi) Dalam melaporkan suatu berita, jurnalis perlu mempunyai keahlian untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, terutama dalam bidang komunikasi. Tugas jurnalis tidak hanya terbatas pada penulisan berita, tetapi juga memerlukan kemampuan untuk membagikan berita dengan beragam teknik. Hal ini termasuk dalam menyampaikan informasi secara tertulis, tetapi juga melibatkan penggunaan gambar pendukung ataupun bentuk penyajian audio visual. Jurnalis perlu bisa mengakomodasi kebutuhan dan preferensi pembaca dalam menyajikan berita. 3. Scannability (dipindai) Situs ataupun portal berita harus memiliki kemampuan yang memungkinkan para pembaca untuk melakukan pemindaian dengan mudah. **3 4 5 8 11** Hal ini karena sebagian besar pembaca mencari berita dengan spesifikasi dengan cara memindai halaman situs atau web. Mereka biasanya mencari informasi utama melalui subheading, link, dan elemen yang lain agar membantu mereka menavigasi konten tulisan tanpa harus menghabiskan waktu yang lama di depan monitor. **3 5 8** Maka, penentuan judul sebuah berita menjadi sangat penting. 4. Intercreativity (interaktivitas) Pembaca diberikan peran sebagai pengguna, yang



mengizinkan mereka untuk memberikan respons ataupun berkomunikasi dengan jurnalis melalui halaman situs. 3 4 5 8

Dengan adanya interaksi ini, pembaca akan merasa terlibat dan dihargai, oleh karenanya mereka akan merasa senang dan terus menerus mengunjungi situs tersebut. 5.

Community and Conversation (komunitas dan percakapan) Pembaca media daring tidak hanya menjadi konsumen pasif, contohnya pembaca koran dan penonton televisi. Media online memungkinkan pembaca agar berinteraksi

secara langsung dengan konten, misalnya melalui kolom komentar ataupun pengiriman saran.

Sebagai respons terhadap interaksi ini, jurnalis bisa merespons

komentar pembaca, oleh karenanya menciptakan komunitas dan dialog yang aktif di dalamnya. 2.2 6 Konstruksi Realitas Media Konstruksi realitas sosial mengacu pada proses sosial di mana individu atau kelompok,

melalui tindakan dan komunikasi mereka, secara terus-menerus menciptakan dan mengalami realitas bersama yang bersifat subjektif. Konsep ini pertama

kali diperkenalkan oleh Alfred Schutz yang menjelaskan konteks berita merupakan realitas yang disajikan bukanlah representasi langsung dari peristiwa yang sebenarnya terjadi. Sebaliknya, realitas tersebut terbentuk

melalui interaksi sosial dan budaya antara jurnalis dan narasumber, serta dipengaruhi oleh dinamika politik informasi dalam setiap siklus berita. Berita tidak selalu menggambarkan realitas secara akurat karena melalui proses seleksi tertentu. Media cenderung memilih fakta-fakta tertentu untuk diberitakan, sementara aspek-aspek lainnya diabaikan atau

disembunyikan. Hal ini karena latar belakang sosial dan politik yang beragam dari pemilik dan pengambil keputusan media, yang dapat memengaruhi sudut pandang dan partisipasi mereka dalam proses pemberitaan. Selain itu, karakteristik organisasi media serta peran

profesional di dalamnya turut memengaruhi kekuatan media dalam membentuk pesan dan memengaruhi wacana publik (Santoso P, 2016). 12

Hasil yang diciptakan melalui konstruksi realitas sosial tentunya memiliki pembedaan pemberitaan yang pasti berbeda, terutama pada media massa daring.

Kompas.com dan Republika Online sebagai media daring tentunya memiliki

karakteristik dalam merepresentasikan hasil ciptaan realitas yang akan disampaikan kepada publik. Pada konteks ini, media daring dapat dijadikan acuan dalam pembentukan realitas yang memiliki dasar ideologi oleh masing-masing media. Penelitian ini akan berfokus pada realitas sosial yang akan dihasilkan dari interaksi individu pada peran sosial dan peran sosial tersebut dipublikasikan oleh media massa. Konteks yang akan dianalisa adalah pemingkakan pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilpres 2024 pada media Kompas.com dan Republika Online periode September 2023 – Januari 2024.

### 2.2 7 Agenda Setting

Agenda setting menjelaskan bahwa media memiliki pengaruh terhadap audiens dalam membentuk persepsi tentang isu tertentu. Ketika media memberikan perhatian besar pada suatu peristiwa, hal tersebut cenderung membuat audiens menganggap kejadian tersebut sebagai hal yang cukup penting. Agenda setting ini diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw untuk menjelaskan suatu fenomena yang telah diamati dan diteliti dalam konteks kampanye Pemilu (Morissan,2015). E.M. Griffin menjelaskan bahwa McCombs dan Donald Shaw mengadopsi istilah Agenda Setting dari Bernard Cohen (1963) melalui hasil penelitian terkait media massa. Media massa mengacu pada saluran publikasi berita yang dihasilkan dari aktivitas jurnalistik para wartawan. Seiring dengan perkembangan teknologi, muncul istilah media baru atau new media . Media baru ini menawarkan fitur seperti digitalisasi, konvergensi, interaktivitas, dan pengembangan jaringan dalam proses pembuatan dan penyampaian pesan. Asumsi utama dari teori ini adalah bahwa media memiliki kemampuan untuk mentransfer isu-isu tertentu sehingga dapat memengaruhi agenda publik. Isu yang dianggap penting oleh media akan cenderung dipersepsikan sebagai hal yang penting oleh publik. Agenda setting dapat memberikan dampak terhadap perspektif dan asumsi publik, Berikut cara agenda setting dalam mempengaruhi publik :

1. Penjelasan isu oleh media massa : Penyajian isu oleh media massa menunjukkan bahwa media dengan platform yang kuat memiliki otoritas untuk menentukan isu-isu tertentu yang akan diliput dan

diberitakan. Proses ini dikenal dengan istilah agenda media. 2. Ketertarikan publik terhadap isu : Media massa secara konsisten memberitakan suatu isu atau fenomena, perhatian publik terhadap isu tersebut akan meningkat. Proses ini berperan dalam membentuk dan mengubah perspektif publik, sehingga mereka cenderung memberikan perhatian lebih dan menganggap bahwa isu yang diberitakan merupakan hal yang penting. 3. Pentingnya isu : Media massa memiliki kemampuan untuk menentukan frekuensi dan intensitas pemberitaan suatu isu, sehingga dapat mengatur prioritas isu tersebut serta membentuk perspektif publik terhadap fenomena yang sedang terjadi. Dengan adanya agenda setting , tentunya akan melihat bagaimana peran dan kekuatan media dalam mengatur dan membentuk sudut pandang terhadap isu yang sedang atau akan terjadi. Akan tetapi, agenda setting tidak dapat mengatur dan membentuk setiap individu. 2.3. Kerangka Berpikir Pada kerangka berpikir penelitian tersebut, berawal dari peristiwa peningkatan pelanggaran netralitas ASN dala Pilpres 2024, kemudian muncul beragam pemberitaan netralitas ASN dalam Pilpres 2024 dari dua media nasional Kompas.com dan Republika Online. Kemudian muncul rumusan masalah yaitu bagaimana pemingkaian netralitas ASN dalam Pilpres 2024. 2 7 Peneliti menggunakan analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki yang memiliki empat struktur yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retorik yang akan digunakan untuk mengetahui pemingkaian pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilpres 2024 pada media Kompas.com dan Republika Online periode September 2023- Januari 2024. 14 BAB III METODE PENELITIAN 3.1. Pendekatan Penelitian Dalam riset berikut memakai metode kualitatif berdasarkan pada paradigma konstruktivisme. Pendekatan kualitatif memandang realitas sebagai hasil dari interaksi sosial yang merekonstruksi makna, yang turut melibatkan partisipasi individu dalam pembentukan realitas tersebut. Dari perspektif epistemologis, penelitian kualitatif mengakui dan menekankan perlunya keterlibatan peneliti dalam objek studi ataupun realitas yang sedang diselidiki. Dalam penyajian data, penelitian

kualitatif cenderung menggunakan gaya penulisan yang lebih santai dan tidak terlalu formal. Di samping itu, umumnya penelitian kualitatif memanfaatkan informasi dalam bentuk verbal dan nonverbal, serta data numerik ataupun angka sebagai penunjangnya (Creswell, 2014). Berdasarkan pendapat dari Marshal, Hatch dan Rosman dalam Creswell (2014), penelitian kualitatif terbagi menjadi beberapa ciri, yaitu: 1. Natural Setting Peneliti perlu membawa informasi yang dibutuhkan secara langsung ke tempat penelitian, di mana masalah dan pertanyaan sedang diselidiki. Peneliti harus berinteraksi langsung dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. 2. Research as Key Instrument Peneliti harus mengambil peran penting dalam mengumpulkan dokumen-dokumen, wawancara sumber ataupun narasumber, dan observasi. 3. Multiple Source of Data Dalam penelitian kualitatif harus memiliki beragam sumber data seperti dokumen, audio dan visual, wawancara, dan observasi. 4. Inductive and Deductive Data Analysis Peneliti menyusun pola dan tema secara sistematis dari data yang lebih spesifik ataupun khusus ke yang lebih umum dengan menyusun informasi ke dalam unit-unit yang semakin abstrak. Sementara itu, dalam pendekatan deduktif, peneliti mengevaluasi data yang ada dan menentukan apakah sudah cukup banyak data pendukung ataupun apakah diperlukan pengumpulan informasi tambahan. 5. Participant Meaning Peneliti harus memiliki tujuan yang jelas agar mendapatkan alasan dari sumber ataupun narasumber yang terlibat dalam peristiwa ataupun isu yang sedang terjadi. Paradigma penelitian mencakup keseluruhan kerangka pemikiran yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran tersebut mencakup pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian, asumsi dasar yang digunakan, serta teknik penelitian yang akan diterapkan. Para ilmuwan sosial menyatakan bahwa kita bisa memahami dunia sosial dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmiah. Dengan melakukan pengamatan yang teliti dan sistematis terhadap dunia sosial, serta menggabungkannya dengan pemikiran yang cermat dan logis, penelitian bisa memperoleh informasi yang baru dan berharga (Neuman, 2014). Kerangka dasar dalam

penelitian bisa diklasifikasikan ke dalam tiga pendekatan yang berbeda. Pendekatan adalah sudut pandang yang digunakan untuk memahami, mengamati, dan mengukur realitas sosial yang sedang diteliti. Ketiga pendekatan dalam riset berikut meliputi ilmu sosial empiris (positivist social science), ilmu sosial interpretatif (interpretive social science), serta ilmu sosial kritis (critical social science). Paradigma kritis berkaitan dengan situasi ketidakadilan dalam masyarakat, sementara positivisme digunakan untuk meramalkan pola umum yang melibatkan logika deduktif. Di sisi lain, paradigma interpretatif ataupun konstruktivis dipaki untuk membangun pemahaman yang menerapkan analisis sistematis dengan melakukan observasi yang detail serta subjektif guna mempertahankan struktur sosial (Neumen, 2014). Dalam riset berikut, peneliti memilih paradigma konstruktivis karena dianggap mampu mengatasi perumusan masalah yang sedang dihadapi dalam penelitian. Dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, realitas sosial dipandang sebagai hasil dari pembangunan manusia dan tidak terjadi secara alami. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pbingkaian pemberitaan netralitas dalam pemilihan presiden 2024 yang melibatkan aparatur sipil negara pada media nasional Kompas.com dan Republika Online.

### 3.2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif agar menginvestigasi bagaimana suatu berita mengenai netralitas dalam pemilihan presiden 2024 disajikan, yang melibatkan aparatur sipil negara dari dua media online nasional yang tidak sama. Peneliti memakai metode analisis framing untuk menganalisis cara berita tersebut diatur di situs Kompas.com dan Republika Online. Framing, ataupun pbingkaian, ialah mekanisme di mana media massa memilih dan menyoroti aspek-aspek tertentu dari realitas sosial. Berdasarkan pendapat dari Pan dan Kosicki, framing merupakan strategi untuk membangun serta memproses berita. Adapun dua konsepsi framing yang saling terkait, yakni konsepsi psikologis serta sosiologis. 15 Konsep psikologis berhubungan di cara seseorang mengolah informasi secara internal dan bagaimana individu tersebut memahami

berbagai informasi yang disusun dalam sebuah skema khusus. Sementara itu, konsepsi sosiologis berkaitan dengan metode seseorang dalam memaknai suatu peristiwa dari perspektif yang spesifik. Selain itu, konsep psikologis bisa diuraikan sebagai proses dimana individu ataupun seseorang mengklasifikasikan, menyusun, dan meninterpretasikan pengalaman sosial mereka agar mengetahui diri sendiri serta dunia eksternal mereka (Eriyanto, 2018). Penelitian ini akan mempergunakan metode Framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki mengembangkan model framing yang lebih terstruktur dengan berfokus pada elemen-elemen yang membangun suatu narasi media. Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki menggolongkan analisis framing dijadikan empat struktur: sintaksis (struktur kalimat), skrip (alur narasi), tematik (pemilihan tema), serta retorik (pilihan bahasa).

### 3.3 Unit Analisis

Unit analisis dalam riset berikut akan berfokus terhadap pembingkaihan pemberitaan netralitas dalam pemilihan presiden 2024 yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mulai diberitakan pada bulan September 2023 hingga Januari 2024. 7 Dalam menganalisis framing, Pan dan Kosicki mengkaji empat elemen utama framing: sintaksis, skrip, tematik, serta retorik. Riset berikut fokus pada elemen sintaksis, yang berkaitan dengan aspek-aspek seperti lead, latar belakang, judul berita, dan sumber kutipan yang memberikan arah. Komponen-komponen dalam sintaksis meliputi: judul berita, yang adalah elemen krusial karena berperan signifikan dalam framing berita. Lead, yang menyoroti perspektif tertentu dari berita tersebut. Latar belakang, memberikan konteks yang bisa mempengaruhi pemahaman pembaca dengan makna yang disampaikan oleh jurnalis. Serta, pengutipan sumber, yang dimaksudkan agar menciptakan objektivitas dalam pelaporan berita (Eriyanto, 2018). Peneliti melakukan pra-riset tentang pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024 dengan kata kunci “Netralitas ASN Dalam Pemilu 2024 di kanal Kompas.com dan Republika Online periode 1 September 2023 hingga 31 Januari 2024. Peneliti hanya memberikan satu tema pemberitaan yaitu netralitas yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil

Negara (ASN) pada Pemilu 2024. Hasil pra-riset Kompas.com sebanyak pemberitaan dan Republika Online sebanyak 61 pemberitaan. Peneliti memilih periode 1 September 2023 hingga 31 Januari 2024 dengan alasan yaitu bulan September 2023 adalah periode di mana penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hingga Januari 2024 dimana masa kampanye sudah hampir berakhir. Unit analisis pada riset berikut ialah 20 artikel tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu 2024 yang dipilih dengan langsung oleh peneliti dan bersumber dari media online nasional Kompas.com dan Republika Online di bulan September 2023 hingga Januari 2024. Pembagian unit analisis pada riset berikut ialah 10 berita “pelanggaran netralitas yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu 2024 dari media Kompas.com dan 10 berita lainnya membahas “peringatan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilu 2024 dari media Republika Online. Peneliti hendak menggunakan 20 berita memakai kriteria menurut waktu serta kronologis di kedua media online tersebut. Total pemberitaan dari media Republika Online lebih sedikit dibandingkan Kompas.com, peneliti lebih dulu memilah berita dari media Republika Online, selanjutnya peneliti memilah pemberitaan dari media Kompas.com dengan memperhatikan waktu publikasi berita, isi berita, serta judul yang sama. Selain karna artikel terpilih sudah sesuai dengan kerangka teori pan dan kosicki artikel-artikel tersebut mengandung nilai berita atau newsworthines yang tinggi, aktual dan memiliki kedekatan dengan isu netralitas ASN dalam Pilpres 2024, sehingga secara signifikan dapat dilakukan peningkatan. Berikut adalah artikel-artikel berita yang peneliti ambil untuk menjadi unit analisis pada riset berikut: Tabel 3.1. Unit Analisis Artikel Berita Kompas.com dan Republika Online

No	Artikel Kompas.com	Artikel Republika Online
1.	Tanggal : 22, September 2023 Bawaslu Rilis Indeks Kerawanan Netralitas ASN, 10 Provinsi Ini Paling Rawan	Tanggal : 6, September 2023 Kemenag: ASN Netral Jaga Kerukunan di Tahun Politik Jelang Pemilu 2024
2.	Tanggal : 22,	

REPORT #24496459

September 2023 Bawaslu Ungkap Sebab dan Motif ASN Kerap Tak Netral dalam Pemilu, Apa Saja? Tanggal : 26, September 2023 Bawaslu DIY Ajak Masyarakat Awasi Netralitas ASN di Medsos 3. Tanggal : 6, Oktober 2023 Mayoritas ASN Langgar Netralitas karena Kampanye di Media Sosial Jelang Pemilu Tanggal : 31, Oktober 2023 Wapres Maruf Tegaskan ASN Harus Netral pada Pemilu 2024 4. Tanggal : 6, Oktober 2023 10 Provinsi Ini Paling Rawan Langgar Netralitas ASN pada Pemilu 2024 Tanggal : 1, November 2023 Pemprov Jatim Tegaskan Netralitas ASN pada Pemilu 2024 5. Tanggal : 6, November 2023 Tanggal : 5, Desember 2023 16 Bawaslu Waspada Netralitas ASN Kabupaten Malang, IKP Tertinggi di Jatim Masa Pemilu, Pj Wali Kota Sukabumi Ingatkan Netralitas ASN dan Larangan Pose Jari 6. Tanggal : 19, November 2023 Saling Tuduh soal Netralitas Aparat Jelang Pemilu 2024 Tanggal : 11, Desember 2023 Jelang Pemilu 2024, Komisi II Ingatkan Netralitas ASN 7. Tanggal : 6, Desember 2023 Bawaslu Ungkap Penyebab Polarisasi Pemilu: Medsos, Netralitas ASN, dan Politik Identitas Tanggal : 18, Desember 2023 Buat Pakta Integritas, Bupati Sukabumi Wanti- Wanti Netralitas ASN. 8. Tanggal : 11, Desember 2023 Kominfo Awasi Netralitas ASN di Ruang Digital, "Like" Unggahan Kampanye Dilarang Tanggal : 5, Januari 2024 Keluarkan Maklumat, Sivitas Akademika UMJ Minta Presiden tetap Jaga Nilai Moral dan Etika 9. Tanggal : 18, Januari 2024 Pelanggaran Netralitas ASN Marak, Komitmen Pemerintahan Jokowi Disorot Tanggal : 11, Januari 2024 Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024 10. Tanggal : 31, Januari 2024 Pelanggaran Netralitas ASN Meningkatkan Jelang 2024, Masa Sebelum Kampanye Dinilai Rawan Tanggal : 31, Januari 2024 KASN Waswas Mobilisasi ASN di Pemilu 2024 (Sumber: Olahan Peneliti) Peneliti akan melaksanakan analisis 10 artikel berita di tiap-tiap media, 10 berita yang peneliti pilih memiliki unsur yang lengkap di dalam penulisannya oleh karenanya peneliti bisa menganalisanya dengan menggunakan analisis framing Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki.

3.4 Teknik Pengumpulan Data Pada penelitian memerlukan pengumpulan data yang memiliki keterkaitan dalam permasalahan yang ada pada penelitian yang sedang dijalankan. Semua data harus dikumpulkan menggunakan metode yang selaras pada tema penelitian yang berguna agar mencapai tujuan yang dibuat. Pemilihan teknik pengumpulan data harus dilakukan dengan benar, karena akan mengoptimalkan proses penelitian dengan memastikan data yang diperoleh memiliki relevansi dan kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, proses teknik pengumpulan data sangatlah penting, karena memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas (Hardani, 2020). Teknik pengumpulan data di penelitian ini berfokus pada informasi yang tidak bisa diwujudkan dalam bentuk numerik ataupun pengukuran kuantitatif. Metode yang dipergunakan oleh peneliti ialah dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini dapat diartikan untuk catatan ataupun rekaman dari peristiwa yang telah terjadi, yang bisa berupa buku, arsip, dokumen tertulis, ilustrasi, ataupun foto, yang semuanya digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi tertentu (Sugiyono, 2017). Jenis data primer yang dipergunakan pada penelitian ini yakni data yang ditemukan dengan langsung dari portal berita online nasional Kompas.com dan Republika Online terkait pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024. Data-data yang diperoleh akan diurutkan sesuai dengan rentan waktu dan kronologis yang terbitkan oleh media online Kompas.com dan Republika Online dengan memakai analisis framing Pan dan Kosicki. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder dengan penelitian terdahulu seperti jurnal, artikel, buku, serta sumber dari internet. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada riset berikut meliputi: 1) Memilih artikel ataupun pemberitaan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan presiden 2024 pada bulan September 2023 – Januari 2024 di portal berita online Kompas.com dan Republika Online. 2) Menyusun urutan waktu dan kronologis pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan presiden 2024 yang akan dianalisa oleh

peneliti. Sumber data primer dan sekunder yang akan diambil berasal dari portal Kompas.com dan Republika Online, serta buku dan jurnal komunikasi yang memiliki hubungan pada penelitian yang sedang dijalankan. Peneliti mengambil data primer dari 20 berita yang akan dianalisis dan melakukan perbandingan pembikaaian pemberitaanya antara kedua media online tersebut dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024. 3.5 Metode Pengujian Data Dalam penelitian kualitatif, evaluasi kevalidan data bisa dilihat melalui empat standar utama, yakni kepercayaan (credibility), transferabilitas (transferability), konsistensi (dependability), serta kepastian (confirmability). Validitas data juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan peneliti terhadap analisis serta data yang diperoleh, yang mencerminkan realitas sosial yang ada. Validitas data dalam penelitian, yaitu: 17

1. Konsistensi ( Dependability ), menekankan pada kemampuan peneliti untuk secara konsisten mengumpulkan data, serta mengembangkan dan menerapkan konsep-konsep dalam menarik kesimpulan. Untuk memastikan kesesuaian langkah dan temuan, peneliti berkoordinasi dengan dosen pembimbing untuk mengonfirmasi apakah prosedur yang diikuti dan hasil yang diperoleh sudah tepat.
2. Keteralihan ( Transferability ), merujuk pada kemampuan untuk mengaplikasikan temuan penelitian ke dalam konteks lain ataupun situasi yang serupa, oleh karenanya orang lain yang menghadapi situasi yang identik bisa memanfaatkan kesimpulan yang ditarik dari penelitian.
3. Kepercayaan ( Credibility ), untuk menguji kredibilitas atau kepercayaan terhadap data dalam penelitian dengan melakukan pengamatan, meningkatkan ketelitian penelitian, melakukan diskusi, dan menganalisa kasus.
4. Kepastian ( Confirmability ), menjelaskan konsistensi dan kehandalan data dengan menggunakan cara mengumpulkan data tanpa turun langsung ke lapangan atau melakukan audit terhadap seluruh aktivitas penelitian, dimulai dari penetapan masalah hingga membuat kesimpulan. Dari keempat standar utama diatas saat menguji keabsahan data, peneliti mempergunakan dua dari keempat standar utama

tersebut yaitu transferability yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian masih bisa dibahas secara relevan pada konteks yang lain. Jadi, setelah diuji, temuan penelitian tidak hanya relevan pada satu kasus atau media tertentu saja, tetapi juga bisa dipakai di situasi yang berbeda. Lalu, Dependability dilakukan pada penelitian framing karena peneliti sudah melalui proses analisis yang konsisten dan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, objek penelitian dapat diteliti dengan tata cara yang sama secara konsisten oleh peneliti lainnya.

### 3.6 Metode Analisis Data Untuk memenuhi tahap metode pengujian, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data yang berfungsi untuk menjawab tujuan dari penelitian agar rumusan masalah penelitian dapat dijawab dengan benar, pemilihan metode analisis data wajib disesuaikan dengan jenis penelitian yang sedang dilakukan. Maka dari itu, proses dan keputusan dalam memilih metode analisis data memiliki peran yang cukup penting pada penelitian. Peneliti memanfaatkan metode analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki agar mengevaluasi data yang sudah dilakukan pengumpulan. Dengan mempergunakan pendekatan analisis framing Pan dan Kosicki, peneliti akan mengorganisir temuan data ke dalam empat aspek struktural berita, termasuk sintaksis, skrip, tematik, serta retorik (Fadilah, Haris, & Achmad, 2020).

1. Sintaksis: Merujuk pada cara bagaimana seorang jurnalis menyusun fakta dalam penyajiannya. Melalui struktur ini, bisa dinilai sejauh mana objektivitas serta netralitas dari suatu berita yang telah dipublikasikan.
2. Skrip: Pandangan jurnalis dalam menyajikan sebuah peristiwa (Fadilah, Haris, dan Achmad, 2020). Penulisan laporan berita sering dilaksanakan dengan cara yang mirip dengan penulisan cerita, karena hal ini bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara peristiwa tersebut dengan kejadian sebelumnya, dan juga untuk menghubungkan teks berita dengan pengalaman komunal pembaca.

**7 9** Pan & Kosicki menambahkan jika format umum pada struktur skrip ini ialah 5W+1H, yang meliputi Who, What, When, Where, Why, dan

How (Fadilah, Haris, dan Achmad, 2020). 3. Tematik: Struktur tematik mengacu pada cara jurnalis mengatur fakta-fakta tentang suatu peristiwa menjadi proposisi, kalimat, ataupun hubungan antar kalimat yang terbentuk menjadi teks dengan keseluruhan (Fadilah, Haris, dan Achmad, 2020). Melalui struktur tematik ini, peneliti bisa memahami bagaimana perspektif jurnalis tercermin pada struktur yang lebih rinci (Sobur, 2018). 4. Retoris: Struktur retorik membahas bagaimana jurnalis menyoroti makna melalui gaya penulisan ataupun kata-kata dengan menciptakan citra, menyoroti bagian-bagian tertentu, dan memperkuat gambaran dari suatu berita. Komponen retorik meliputi leksikon, yaitu pemilihan serta penggunaan kata-kata untuk menandai ataupun menggambarkan peristiwa (Fadilah, Haris, & Achmad, 2020). Penekanan tidak hanya dikerjakan dengan kata-kata, tetapi juga bisa diwujudkan pada bentuk grafis seperti gambar, tabel, foto, serta lainnya (Fadilah, Haris, & Achmad, 2020). Selanjutnya, dalam metode analisis framing yang dikembangkan oleh Pan dan Kosicki akan digunakan untuk menganalisis berita yang sudah ditentukan oleh peneliti. 2 Empat struktur utama yang dibahas dalam analisis ini yakni sintaksis, skrip, tematik, serta retorik. Struktur sintaksis tersusun dari judul, lead, latar belakang, kutipan. Pernyataan sumber, penutup. Struktur skrip tersusun dari 5W+1H yang menjelaskan apa, kapan, siapa, dimana, mengapa, dan bagaimana. 7 Struktur retorik digunakan untuk melihat penggunaan kata, idiom, grafik, gambar, serta metafora dalam penulisan berita. Selanjutnya, struktur tematik dipakai untuk melihat paragraf, preposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat di dalam berita. Peneliti akan menganalisis tabel yang didalamnya berisi artikel berita dan dimensi yang relevan untuk setiap struktur. Setelah menganalisis setiap artikel dengan cara terpisah, peneliti akan melakukan kurasi dan menyimpulkan hasil dari setiap artikel berita yang di analisis. Setelah menganalisis setiap artikel secara terpisah, peneliti akan membandingkan hasil analisis dari 18 masing-masing artikel. Dengan demikian, hasil yang akan ditemukan ialah Kompas.com dan Republika

Online berbeda dalam cara mereka menyampaikan berita mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemilihan presiden 2024 meskipun kedua media tersebut berskala nasional. 3.7 Keterbatasan Penelitian Keterbatasan dalam sebuah penelitian merupakan hal yang umum terjadi. Penting untuk mengakui keterbatasan penelitian, karena untuk memastikan hasil penelitian memiliki manfaat dan relevan. Penelitian ini dilakukan dengan segala keterbatasan yang akan membuat penelitian ini menjadi sebuah penelitian yang sempurna. Berikut keterbatasan pada penelitian ini terdiri dari sejumlah hal, yakni: 1. Validitas dan Reabilitas alat ukur dalam penelitian ini terbatas karena terdapat bias kognitif dan pemahaman makna dari peneliti yang berpengaruh dalam menganalisis pembedaan berita. BAB V PENUTUP 5.1 Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan pembedaan artikel berita media Kompas.com dan Republika Online tentang kasus netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Presiden 2024 dengan periode September 2023 – Januari 2024. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan artikel pemberitaan berjumlah 10 artikel berita mengenai pelanggaran netralitas ASN dari media Kompas.com dan pada media Republika Online berjumlah 10 artikel berita tentang peringatan netralitas ASN pada Pilpres 2024. Pembatasan pada pemilihan artikel berita yaitu selain karena artikel terpilih sudah sesuai dengan kerangka teori Pan dan Kosicki artikel-artikel tersebut mengandung nilai berita (newsworthiness) yang tinggi, aktual dan memiliki kedekatan dengan isu netralitas ASN dalam Pilpres 2024, sehingga secara signifikan dapat dilakukan pembedaan. Untuk menjawab tujuan dilakukannya penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis framing Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki. Metode ini dapat digunakan agar mengetahui bagaimana pengemasan yang dilakukan oleh media Kompas.com dan Republika Online dalam membicarakan kasus netralitas ASN dalam Pemilihan Presiden 2024. Analisis framing memiliki beberapa struktur yakni sitaksis, skrip, tematik dan retorik yang akan digunakan untuk

melakukan sebuah analisis pada setiap artikel pemberitaan yang dipublikasikan oleh media Kompas.com dan Republika Online. Temuan utama pada penelitian ini yaitu adanya perbedaan yang terlihat mengenai netralitas ASN dalam Pemilihan Presiden 2024. Pada media Kompas.com lebih menekankan 19 pemberitaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan kepentingan politik, sedangkan media Republika Online lebih banyak menyuarakan kalimat-kalimat ajakan yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Pemilihan Presiden 2024 yang kondusif. Semengntara itu, peneliti menemukan temuan menarik yang peneliti dapatkan dari penelitian ini yaitu pada media Kompas.com menuliskan pelanggaran netralitas ASN dengan menggunakan kata-kata yang identik dengan cerminan dari seorang ASN seperti, pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) akan terjadi konflik yaitu polarisasi Pemilu. Ditambah dengan latar belakang oknum ASN yang memiliki jabatan tinggi pada setiap lembaga pemerintah. Seperti contohnya dalam narasi pemberitaan yang dilakukan oleh media Republika Online dengan judul artikel berita “Komisi X Ingatkan ASN Pendidik Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024 yang menjelaskan mengenai keberpihakan oknum tenaga pendidik atau guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara di Tasikmalaya mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden secara terbuka.

### 5.2 Saran Berdasarkan temuan pada penelitian ini telah menemukan hasil dengan adanya bukti perbedaan pembedaan berita yang dilakukan oleh media Kompas.com dan Republika Online mengenai netralitas ASN dalam Pemilihan Presiden 2024 pada periode September 2023 – Januari 2024. Penelitian ini memiliki keterbatasan, maka dimasa yang akan datang perlu ada penelitian lanjutan.

#### 5.2.1 Saran Akademis Penelitian ini hanya berfokus pada pembedaan pemberitaan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Presiden 2024 periode September 2023 – Januari 2024, maka penelitian selanjutnya dapat menganalisis lebih dalam dengan menggunakan metode analisis berbeda seperti studi kasus atau wacana kritis. Hal ini

REPORT #24496459

diharapkan dapat mengetahui alasan dari jurnalis dalam melakukan pemberitaan pada setiap artikel berita yang dipublikasikan. 5.2.2 Saran Praktis Temuan penelitian pembingkaiian pemberitaan netralitas ASN dalam Pemilihan Presiden 2024 pada Kompas.com dan Republika Online menunjukkan bahwa kedua meda tersebut mempunyai pembingkaiian yang berbeda dari keempat struktur framing Pan & Kosicki yaitu sintaksis, retorik, skrip, dan tematik.. Maka dari itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih kritis dalam melihat berita yang dipublikasikan oleh media online . Kemudian perolehan dari penelitian ini mampu dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya dengan menekankan nilai-nilai berita. 20



REPORT #24496459

## Results

Sources that matched your submitted document.

● IDENTICAL ● CHANGED TEXT

INTERNET SOURCE		
1.	<b>3.8%</b> <a href="https://berkas.dpr.go.id">berkas.dpr.go.id</a> <i><a href="https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat---20-II-P3DI-...">https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat---20-II-P3DI-...</a></i>	● ●
INTERNET SOURCE		
2.	<b>3.19%</b> <a href="https://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> <i><a href="https://digilib.uinsgd.ac.id/90991/4/4_bab1.pdf">https://digilib.uinsgd.ac.id/90991/4/4_bab1.pdf</a></i>	● ●
INTERNET SOURCE		
3.	<b>2.18%</b> <a href="https://romeltea.wordpress.com">romeltea.wordpress.com</a> <i><a href="https://romeltea.wordpress.com/2019/04/05/jurnalistik-online-pengertian-prins...">https://romeltea.wordpress.com/2019/04/05/jurnalistik-online-pengertian-prins...</a></i>	●
INTERNET SOURCE		
4.	<b>2.12%</b> <a href="https://pakarkomunikasi.com">pakarkomunikasi.com</a> <i><a href="https://pakarkomunikasi.com/jurnalistik-online">https://pakarkomunikasi.com/jurnalistik-online</a></i>	●
INTERNET SOURCE		
5.	<b>1.96%</b> <a href="https://eprints.upj.ac.id">eprints.upj.ac.id</a> <i><a href="https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/4214/9/BAB%20II.pdf">https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/4214/9/BAB%20II.pdf</a></i>	●
INTERNET SOURCE		
6.	<b>1.31%</b> <a href="https://repositori.buddhidharma.ac.id">repositori.buddhidharma.ac.id</a> <i><a href="https://repositori.buddhidharma.ac.id/2036/2/COVER%20-%20BAB%20III%20.pdf">https://repositori.buddhidharma.ac.id/2036/2/COVER%20-%20BAB%20III%20.pdf</a></i>	●
INTERNET SOURCE		
7.	<b>1.26%</b> <a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> <i><a href="http://repository.uinsu.ac.id/15243/1/Skripsi-Fitri%20Rezkie.pdf">http://repository.uinsu.ac.id/15243/1/Skripsi-Fitri%20Rezkie.pdf</a></i>	●
INTERNET SOURCE		
8.	<b>1.25%</b> <a href="http://repository.usahidsolo.ac.id">repository.usahidsolo.ac.id</a> <i><a href="http://repository.usahidsolo.ac.id/2757/4/c_Skripsi_2018071010%20-%20BAB%...">http://repository.usahidsolo.ac.id/2757/4/c_Skripsi_2018071010%20-%20BAB%...</a></i>	●
INTERNET SOURCE		
9.	<b>1.22%</b> <a href="http://repository.unissula.ac.id">repository.unissula.ac.id</a> <i><a href="http://repository.unissula.ac.id/35151/1/Ilmu%20Komunikasi_32801700024_full...">http://repository.unissula.ac.id/35151/1/Ilmu%20Komunikasi_32801700024_full...</a></i>	●



REPORT #24496459

INTERNET SOURCE

10. **1.18%** [www.jurnalintelektiva.com](http://www.jurnalintelektiva.com) 

<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/409>

INTERNET SOURCE

11. **1.05%** [eskripsi.usm.ac.id](http://eskripsi.usm.ac.id) 

<https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2019/G.311.19.0015/G.311.19.0015-...>

INTERNET SOURCE

12. **1.03%** [eprints.upj.ac.id](http://eprints.upj.ac.id)  

<https://eprints.upj.ac.id/id/eprint/9264/9/9.%20BAB%20II.pdf>

 QUOTES

INTERNET SOURCE

1. **0.36%** [repositori.buddhidharma.ac.id](http://repositori.buddhidharma.ac.id)

<https://repositori.buddhidharma.ac.id/2036/2/COVER%20-%20BAB%20III%20.pdf>

INTERNET SOURCE

2. **0.22%** [digilib.uinsgd.ac.id](http://digilib.uinsgd.ac.id)

[https://digilib.uinsgd.ac.id/90991/4/4\\_bab1.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/90991/4/4_bab1.pdf)

INTERNET SOURCE

3. **0.17%** [www.jurnalintelektiva.com](http://www.jurnalintelektiva.com)

<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/409>